

Analisis Wacana Kritis terhadap Pernyataan Asep Iwan Iriawan dalam Pemberitaan Kasus Korupsi CPO pada Kanal YouTube Metro TV

Fina Juliyanti¹, Mayasari², Wahyu Utamidewi³

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang,
Indonesia

E-mail: fina.juliyanti18027@student.unsika.ac.id, mayasari.kurniawan@fisip.unsika.ac.id,
wahyu.utamidewi@fisip.unsika.ac.id

Article History:

Received: 13 Juli 2025

Revised: 03 September 2025

Accepted: 21 September 2025

Keywords:

Critical Discourse, Reporting on CPO Corruption Cases, YouTube Metro TV

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis pernyataan Asep Iwan Iriawan di kanal YouTube Metro TV terkait kasus korupsi ekspor Minyak Sawit Mentah (CPO) senilai Rp11,8 triliun. Pernyataan kontroversial "ada elit yang bermain" menjadi fokus penelitian ini karena mengandung makna simbolis dan kritik terhadap aktor-aktor berpengaruh dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (CDA) Norman Fairclough, penelitian ini mengeksplorasi tiga dimensi utama: analisis teks (mikro), praktik diskursif (meso), dan praktik sosial (makro). Data primer diperoleh dari transkrip video siaran YouTube Metro TV pada 17 Juni 2025, sementara data sekunder berasal dari laporan media dan dokumentasi resmi. Analisis mikro menunjukkan bahwa Asep menggunakan kosakata retorik dan metaforis yang membingkai elit berkuasa sebagai pihak yang diduga berperan dalam proses hukum. Analisis mesostruktural menunjukkan bahwa pernyataan tersebut diproduksi dan disebarluaskan oleh media arus utama tetapi dikonsumsi oleh publik melalui platform digital, sehingga menimbulkan beragam interpretasi. Sementara itu, analisis makro mengungkap konteks sosial-politik yang mendasari pernyataan tersebut, termasuk krisis kepercayaan terhadap lembaga hukum dan tingginya tingkat korupsi.

PENDAHULUAN

Data Indonesia Corruption Watch (2023) bahwa jumlah kasus korupsi terus meningkat secara signifikan, yakni 533 kasus pada 2021, 579 kasus di 2022, dan melonjak menjadi 791 kasus pada 2023, dengan jumlah tersangka mencapai 1.695 orang. Pada tahun (2024), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 142 penyidikan kasus dan menetapkan 163 tersangka, dengan nilai pemulihan aset mencapai Rp6,7 triliun. Peningkatan jumlah kasus ini menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi fenomena sistemik yang merambah berbagai sektor. Selain itu,

potensi kerugian negara akibat korupsi pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp28,4 triliun, menurun dari Rp42,7 triliun pada 2022. Meski jumlah kerugian menurun, frekuensi kasus meningkat, yang menunjukkan bahwa korupsi dilakukan dalam skala yang lebih kecil namun lebih masif. Data ini juga memperkuat pandangan bahwa korupsi telah menjadi budaya yang mengakar di birokrasi dan pemerintahan. Oleh karena itu, studi yang menelaah aspek diskursif dan ideologis dari pemberitaan dan komentar publik terhadap kasus-kasus korupsi menjadi semakin relevan.

Kasus dugaan korupsi dalam ekspor minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil* atau CPO) yang terjadi antara tahun 2022 hingga 2023 menjadi sorotan besar di Indonesia. Saat itu, pemerintah sedang melarang ekspor minyak goreng agar harga di dalam negeri tetap stabil. Namun, beberapa perusahaan besar seperti Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group justru diduga menyalahgunakan kebijakan tersebut untuk keuntungan sendiri. Perbuatan ini menyebabkan negara mengalami kerugian yang sangat besar, mencapai Rp11,8 triliun (Amir et al., 2022).

Kejaksaan Agung kemudian menyita uang tunai senilai Rp2 triliun dalam bentuk pecahan Rp100 ribu, yang dipajang dalam konferensi pers sebagai simbol keberhasilan penyitaan. Uang ini berasal dari lima perusahaan anak Wilmar Group yang sebelumnya diputus bebas oleh pengadilan tingkat pertama. Kelima perusahaan itu antara lain PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Total uang yang berhasil disita mencapai Rp11,8 triliun, dan sekarang dititipkan di rekening milik Kejaksaan sambil menunggu keputusan hukum yang final (MetroTVNews, 2025).

Namun, di luar sisi hukum dan keuangan, kasus ini juga menarik untuk dibahas dari sisi komunikasi dan sosial. Masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi dari berita di televisi, tetapi juga melalui media sosial seperti YouTube, yang menjadi tempat baru bagi masyarakat untuk berdiskusi dan membentuk opini. Salah satu tokoh yang aktif dalam membahas kasus ini adalah Asep Iwan Iriawan, seorang ahli hukum pidana sekaligus mantan hakim. Melalui kanal YouTube Metro TV, ia menyampaikan pandangan kritis tentang kasus CPO dalam video berjudul "*BREAKING NEWS – Kasus Korupsi Rp. 11,8 T CPO, Kang Asep: Ada Wong Elite 'Bermain'*". Dalam salah satu videonya di Youtube, Asep mengeluarkan pernyataan yang menarik perhatian publik, yaitu: "ada wong elite bermain."

Untuk menelaah lebih dalam makna dari pernyataan tersebut, digunakanlah pendekatan Analisis Wacana Kritis dari Norman Fairclough. Menurut Fairclough (2013), bahasa itu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga cara untuk menunjukkan dan melawan kekuasaan. Teori ini menganalisis teks dari tiga sisi: apa yang dikatakan (teks), bagaimana dan dalam situasi apa teks itu disampaikan (praktik wacana), dan apa latar sosial atau politiknya (praktik sosial).

Sejumlah penelitian sebelumnya juga telah menggunakan pendekatan Fairclough untuk mengkaji fenomena serupa. Misalnya, Alamsyah, Mayasari, dan Lubis (2024) meneliti cara Megawati berbicara tentang kelangkaan minyak goreng, dan menemukan bahwa cara bicara elite bisa menimbulkan reaksi penolakan. Sasmita (2022) membuktikan bahwa stand-up comedy bisa jadi sarana kritik sosial lewat candaan. Ikhsan (2022) meneliti bagaimana Twitter menjadi alat publik untuk mengkritik polisi lewat tagar #PercumaLaporPolisi.

Ada juga penelitian lain, seperti dari Iqbal, Mayasari, dan Yanti (2023) yang meneliti bagaimana media seperti Kompas.id menyampaikan isu perpanjangan masa jabatan presiden dengan bahasa yang berhati-hati. Hajrah, Alam, dan Jufri (2024) meneliti pidato Presiden Jokowi pasca-pandemi dan melihat bagaimana gaya bahasanya membentuk citra pemimpin yang kuat dan nasionalis.

Namun, satu hal yang belum banyak diteliti adalah bagaimana seorang tokoh non-pemerintah seperti Asep, yang tidak terikat institusi resmi, bisa memengaruhi opini publik lewat platform seperti YouTube. Ini menjadi celah penting yang perlu diisi dalam dunia akademik, terutama terkait komunikasi hukum di era digital.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana wacana Asep Iwan Iriawan di YouTube membentuk pemahaman publik terhadap kasus korupsi CPO. Penelitian ini akan melihat bagaimana pernyataan "ada wong elite bermain" dibangun, mengandung pesan politik apa, dan seperti apa pengaruhnya terhadap masyarakat, dengan menggunakan teori dari Fairclough.

Penelitian ini penting bukan hanya secara teori, tetapi juga secara praktik. Di zaman sekarang, di mana fakta sering dikaburkan oleh emosi dan persepsi, penting bagi masyarakat untuk memahami bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk opini. Kajian ini juga membantu meningkatkan kesadaran hukum publik dan mendorong transparansi dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara kritis isi dan makna dari pernyataan Asep Iwan Iriawan di YouTube, khususnya terkait kasus korupsi ekspor CPO. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam bidang hukum, komunikasi kritis, dan studi bahasa dalam konteks sosial-politik Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernyataan Asep Iwan Iriawan dalam konteks kasus korupsi CPO menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough. Dengan menelusuri dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial dari pernyataan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat mengungkap strategi wacana yang digunakan oleh elite hukum dalam membentuk persepsi publik. Analisis ini tidak hanya berkontribusi terhadap studi komunikasi hukum, tetapi juga menawarkan pandangan kritis terhadap penggunaan bahasa hukum dalam mendukung atau menutupi praktik korupsi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat literasi hukum kritis masyarakat dan mendorong reformasi struktural dalam sistem peradilan di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Norman Fairclough (2013) merumuskan *Critical Discourse Analysis* (CDA) sebagai pendekatan analitis terhadap bahasa yang tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga politis, ideologis, dan sosiologis. CDA adalah metode yang menelusuri bagaimana makna dibentuk dan dibentuk ulang dalam wacana, serta bagaimana bahasa berperan sebagai instrumen kekuasaan dalam masyarakat. Fairclough menekankan bahwa CDA bersifat transdisipliner, artinya ia menjembatani berbagai ranah ilmu sosial seperti linguistik, sosiologi, ekonomi politik, dan teori media untuk memahami relasi dialektis antara bahasa, kekuasaan, dan praktik sosial

Tujuan utama dari CDA menurut Fairclough (2013) tidak hanya untuk memahami teks secara linguistik, tetapi untuk mengungkap bagaimana struktur sosial menciptakan dan dipertahankan melalui wacana. Bahasa tidak pernah netral; ia digunakan sebagai alat untuk memproduksi, mempertahankan, atau bahkan menantang relasi kekuasaan. Dengan demikian, CDA berfungsi untuk:

1. Menjelaskan bagaimana bahasa berkontribusi pada produksi dan reproduksi ketimpangan sosial;
2. Mengidentifikasi bagaimana ideologi dominan tersembunyi dan disebarluaskan melalui wacana;

3. Mendorong perubahan sosial progresif melalui kritik terhadap konstruksi wacana yang mempertahankan struktur hegemonik.

Dalam konteks sosial yang sarat akan manipulasi bahasa oleh kekuatan dominan misalnya dalam politik, hukum, dan media. CDA berperan sebagai alat pembedah untuk mengungkap “realitas tersembunyi” di balik representasi publik yang tampak wajar atau alamiah.

Analisis wacana kritis Norman Fairclough (2013) membagi wacana menjadi tiga dimensi, yaitu mikro (teks), meso (praktik wacana), dan makro (praktik sosial). Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan membentuk analisis yang komprehensif tentang bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial. Pertama analisis teks mencakup aspek linguistik dari ujaran atau tulisan. Ini melibatkan pemilihan kata (leksikal), struktur gramatikal, metafora, gaya retorika, dan perangkat linguistik lain yang menyusun makna. Analisis pada tahap ini bersifat mikro, namun penting untuk memahami bagaimana makna diproduksi dalam konteks tertentu.

Kedua, praktik wacana merujuk pada proses produksi dan konsumsi teks. Disini, Fairclough menekankan pentingnya konsep intertekstualitas dan interdiskursivitas. Artinya, setiap teks tidak berdiri sendiri, melainkan mengambil makna dari wacana-wacana lain yang sudah ada sebelumnya. Praktik ini berkaitan dengan bagaimana aktor sosial seperti media, institusi, atau individu mengkonstruksi dan menyebarkan makna dalam ruang publik.

Ketiga, praktik sosial mencakup struktur dan relasi sosial yang lebih luas, termasuk sistem kekuasaan, dominasi ideologi, dan tatanan institusional. Pada level ini, CDA menghubungkan analisis linguistik dan diskursif dengan struktur sosial yang lebih besar, misalnya kapitalisme, kolonialisme, neoliberalisme, atau hukum negara.

Pernyataan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat KBBI (2025) , istilah *pernyataan* berasal dari kata dasar nyata yang bermakna “jelas” atau “terbukti”. Dengan penambahan imbuhan per-an, kata ini membentuk nomina yang berarti tindakan atau proses menyatakan sesuatu, seperti penyampaian informasi, pengumuman, atau pemberitahuan resmi. Dalam kehidupan sehari-hari, pernyataan digunakan sebagai bagian dari aktivitas komunikasi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Pernyataan umumnya digunakan oleh individu atau kelompok yang memiliki posisi strategis dalam masyarakat, seperti tokoh publik, pejabat, atau lembaga tertentu. Dalam konteks ini, pernyataan berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan keputusan, menyuarakan opini, atau menjelaskan kebijakan yang memiliki dampak terhadap khalayak luas. Lebih jauh, munculnya sebuah pernyataan sering kali didorong oleh latar belakang situasional atau kepentingan tertentu. Artinya, sebuah pernyataan tidak terlepas dari motivasi sosial, politik, atau institusional yang mendorongnya. Karena itu, isi pernyataan cenderung bersifat penting dan mengandung makna yang berpengaruh terhadap masyarakat luas.

Asep Iwan Iriawan

Asep Iwan Iriawan merupakan tokoh penting dalam dunia hukum pidana Indonesia. Ia dikenal luas sebagai mantan hakim yang berintegritas tinggi, akademisi yang aktif mengajar di berbagai universitas, dan pakar hukum pidana yang kerap tampil di media massa untuk memberikan pandangan hukum atas isu-isu aktual. Karier hukumnya dimulai dari dunia kehakiman, beliau pernah menjabat di Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 1999 - 2000. Selama menjabat, beliau dikenal berani menjatuhkan vonis berat dalam kasus-kasus besar, termasuk hukuman mati bagi terdakwa kasus narkoba. Ketegasannya dalam menjatuhkan putusan menunjukkan sikap tegas terhadap kejahatan berat, namun juga membuatnya kerap berada dalam situasi berisiko.

Tekanan dan ketidaknyamanan atas praktik hukum yang ia anggap tidak sesuai dengan hati nurani membuat beliau memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai hakim. Langkah ini bukanlah bentuk penarikan diri dari dunia hukum, melainkan transisi ke jalur akademik yang ia anggap lebih bebas dalam menyuarakan pandangan kritis. Ia kemudian berkiprah sebagai dosen hukum di Universitas Katolik Parahyangan dan Universitas Trisakti. Dalam lingkungan akademis, Asep dikenal sebagai pengajar yang interaktif, terbuka terhadap diskusi, dan sangat dekat dengan mahasiswa.

Di luar dunia akademik, beliau juga merupakan figur publik yang kerap diminta pendapatnya dalam berbagai forum media, khususnya terkait kasus korupsi dan reformasi hukum. Dalam berbagai tayangan, termasuk di MetroTV dan kanal YouTube-nya, beliau tampil sebagai narasumber ahli hukum yang menjelaskan secara lugas dan kritis permasalahan hukum aktual. Salah satu momen penting adalah keterlibatannya sebagai komentator dalam kasus dugaan korupsi crude palm oil (CPO) senilai Rp11,8 triliun, di mana ia mengkritisi sejumlah aspek hukum dalam proses penegakan kasus tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, fokus bukan pada sisi biografis beliau secara personal, melainkan pada bagaimana media, khususnya MetroTV, membingkai dan merepresentasikan dirinya sebagai figur otoritatif dalam bidang hukum. Beliau ditampilkan sebagai suara hukum yang kredibel, dan sekaligus sebagai simbol antikorupsi yang membawa pesan ke publik melalui saluran media. Representasi tersebut tidak terlepas dari proses produksi media yang memilih kutipan, menyusun narasi, dan menentukan bagaimana sosok Asep ditampilkan kepada audiens.

Youtube

Menurut Miller (2019), YouTube merupakan sebuah platform komunitas berbagi video yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berinteraksi melalui berbagai jenis video secara daring menggunakan peramban web apapun. Sebagai bagian dari ekosistem media sosial yang berkembang pesat, YouTube telah menjadi fenomena global dalam penyebaran informasi, hiburan, dan wacana publik. Platform ini memfasilitasi partisipasi pengguna dalam menciptakan dan mendistribusikan konten secara bebas, menjadikannya sebagai ruang digital yang demokratis dalam menyuarakan opini dan identitas sosial.

YouTube adalah platform milik Google yang memungkinkan siapa saja untuk mengunggah video secara gratis dan menontonnya dari mana pun di dunia (Baskoro, 2009). Platform ini dilengkapi berbagai fitur seperti pencarian video, pemutaran, serta kolom komentar untuk berinteraksi. Lebih dari sekadar tempat menonton video, YouTube telah menjadi ruang digital yang memungkinkan siapa saja berbagi informasi secara visual dan berpartisipasi aktif dalam komunikasi online.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa YouTube memiliki peran besar dalam membentuk pendapat masyarakat, terutama melalui video yang membahas isu-isu sosial. Niu et al. (2023) menemukan bahwa banyak orang menyukai konten bertema politik atau kesehatan karena mudah diakses dan interaktif. Namun, mereka juga mengkhawatirkan risiko penyebaran informasi yang menyesatkan dan adanya bias dari sistem rekomendasi YouTube. Algoritma YouTube sendiri dirancang agar pengguna betah menonton, tapi hal ini juga bisa menyebabkan orang hanya melihat sudut pandang tertentu dan terjebak dalam “gelembung informasi” yang memperkuat pandangan yang sudah mereka miliki.

Metro TV

Metro TV merupakan stasiun televisi berita pertama di Indonesia yang resmi mengudara sejak tanggal 25 November 2000. Lembaga penyiaran ini berada di bawah naungan Media Group,

sebuah perusahaan media yang didirikan oleh Surya Paloh, tokoh pers nasional yang juga dikenal sebagai pendiri Harian Prioritas. Metro TV adalah stasiun televisi berita nasional asal Indonesia yang berada di bawah naungan Media Group, dan dikenal sebagai pelopor siaran berita 24 jam pertama di tanah air. Dengan tagline “Knowledge to Elevate”, Metro TV terus berupaya meningkatkan wawasan publik dan menempatkan diri sebagai media yang memiliki reputasi tinggi dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kredibilitas dalam menyampaikan informasi. Metro TV menyajikan beragam program informatif mulai dari berita harian, talk show, dokumenter, hingga program internasional dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Dikenal sebagai media yang tidak menayangkan sinetron, Metro TV fokus pada konten berbasis informasi dan edukasi publik. Dalam situs resminya, Metro TV mencantumkan informasi kepemilikan yang jelas serta memiliki status terverifikasi oleh Dewan Pers, menunjukkan komitmen terhadap standar profesionalisme jurnalistik di Indonesia. Berkantor pusat di Media Group News Center, Jakarta Barat, Metro TV juga memiliki jaringan kontributor dan wartawan di berbagai daerah untuk memastikan cakupan berita nasional yang merata. Melalui kanal digital seperti YouTube Metro TV, mereka menjangkau audiens yang lebih luas secara daring dan memberikan akses informasi yang mudah di era digital. Salah satu kekuatan Metro TV terletak pada pendekatan editorialnya yang menekankan idealisme, pluralisme, dan nilai-nilai kebangsaan, menjadikannya salah satu media arus utama yang berpengaruh dalam pembentukan opini publik nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan utama penelitian, yaitu untuk menganalisis secara mendalam pernyataan seorang tokoh hukum dalam media massa, khususnya dalam konstruksi wacana mengenai kasus korupsi CPO senilai Rp11,8 triliun yang menjadi perhatian publik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh secara alamiah melalui berbagai sumber seperti wawancara, dokumen observasi dan rekaman video yang selanjutnya di analisis secara induktif untuk menemukan makna yang tersembunyi di balik bentuk-bentuk komunikasi yang tampak. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari studi dokumentasi dan studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari analisis teks, analisis praktik diskursif, dan analisis praktik sosial. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pernyataan verbal (tuturan) Asep Iwan Iriawan seorang mantan hakim dan pakar hukum pidana, sebagaimana ditayangkan dalam program berita MetroTV di kanal YouTube resmi MetroTV pada 17 Juni 2025, yang mengomentari atau menganalisis kasus dugaan korupsi ekspor CPO (Crude Palm Oil) senilai Rp11,8 triliun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dilakukan terhadap pernyataan Asep Iwan Iriawan dalam konteks pemberitaan kasus korupsi CPO menunjukkan bahwa wacana tidak dapat dipahami semata sebagai susunan kalimat atau opini personal. Wacana merupakan bentuk praktik sosial yang kompleks dan sarat akan kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial yang melingkupinya. Melalui pendekatan tiga dimensi dari Norman Fairclough yakni dimensi teks (mikrostruktural), praktik wacana (mesostruktural), dan praktik sosial (makrostruktural) penelitian ini mengungkap bagaimana makna dibentuk, disebarkan, dan diterima dalam ranah publik. Melalui pembahasan

hasil penelitian ini akan diuraikan bagaimana temuan-temuan dari hasil analisis yang telah dilakukan berhubungan dengan teori-teori yang diadaptasi dalam penelitian ini serta hubungan pada kajian wacana kritis serupa yang sebelumnya telah dilakukan.

Pembahasan Analisis Mikrostruktural

Temuan pada level mikrostruktural menunjukkan bahwa pilihan kata, struktur kalimat, serta modalitas dalam pernyataan Asep Iwan Iriawan bukanlah elemen linguistik yang netral, melainkan instrumen aktif untuk membingkai kritik, membangun posisi ideologis, dan menciptakan oposisi terhadap kekuasaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Fairclough (2013) bahwa bahasa merupakan bentuk praktik kekuasaan yang merefleksikan dan sekaligus memengaruhi struktur sosial.

Penggunaan istilah seperti “wong elit” dan “bermain” merupakan contoh leksikal yang sarat makna ideologis. Kata “wong elit”, meskipun tampak sederhana, mengandung konotasi negatif yang menyiratkan eksklusivitas, jarak sosial, serta superioritas kelas penguasa dan pengusaha. Kata ini membentuk oposisi biner antara rakyat biasa dan elit yang memegang kuasa. Sementara itu, kata “bermain” digunakan secara metaforis untuk menggambarkan tindakan manipulatif dalam konteks kekuasaan dan ekonomi, yang secara implisit mengkritik ketidakseriusan atau kepura-puraan dalam pengelolaan negara dan hukum.

Modalitas yang digunakan, seperti dalam kalimat “saya yakin tahulah ini siapa pengusaha siapa penguasa yang bermain di CPO ini” atau “harus dibuka siapapun”, memperlihatkan tingginya tingkat kepastian dan desakan moral. Ini menunjukkan bahwa Asep tidak hanya menyampaikan opini, tetapi juga menuntut tindakan dan mengarahkan penilaian publik. Modalitas epistemik dan deontik bekerja bersama untuk memperkuat posisi Asep sebagai figur dengan otoritas hukum dan moral.

Struktur kalimat dalam pernyataannya juga disusun secara retorik dan repetitif, seperti dalam frasa “entah penguasa entah pengusaha” yang membangun ritme logis sekaligus memperjelas target wacana. Penggunaan gaya paralel seperti ini, menurut Eriyanto (2015), merupakan strategi internal dalam wacana untuk membentuk dan menegaskan relasi antar aktor sosial.

Dalam penelitiannya, Dani Alamsyah, Mayasari, dan Fardiah Oktariani Lubis (2024) juga menunjukkan bahwa gaya bahasa, posisi sosial pembicara, serta konteks produksi wacana turut menentukan bagaimana wacana tersebut diterima oleh publik. Seperti dalam kasus pernyataan Megawati, yang dinilai tidak empatik karena menyederhanakan penderitaan masyarakat, hal serupa juga berlaku dalam wacana Asep, di mana pemilihan kata dan gaya penyampaian menjadi alat untuk mengartikulasikan posisi moral dan politik terhadap kekuasaan.

Dengan demikian, mikrostruktur wacana Asep merefleksikan peran bahasa sebagai alat untuk mengintervensi ruang publik, membentuk opini, dan menantang tatanan kuasa yang selama ini cenderung tertutup dan impersonal. Kombinasi antara pilihan leksikal yang tegas, struktur kalimat yang persuasif, dan modalitas yang kuat menjadikan wacana ini sebagai bentuk praktik diskursif yang efektif dalam memperjuangkan transparansi dan keadilan.

Pembahasan Analisis Mesostruktural

Temuan pada level mesostruktural secara jelas mengilustrasikan konsep sentral Norman Fairclough tentang praktik wacana yang mencakup proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks. Dalam konteks ini, wacana diproduksi oleh Asep Iwan Iriawan, seorang mantan hakim dan pakar hukum pidana yang memiliki modal simbolik dan epistemik tinggi dalam isu-isu hukum dan keadilan.

Produksi wacana berlangsung dalam forum berita langsung *Breaking News* Metro TV, yang memberikan Asep legitimasi untuk menyampaikan pandangan hukum secara terbuka kepada publik. Gaya penyampaian yang lugas, retorik, dan argumentatif memperkuat posisi dirinya sebagai otoritas dalam bidang hukum. Konteks produksi media arus utama ini berperan penting dalam membentuk citra Asep sebagai pembicara kredibel.

Distribusi wacana dilakukan melalui siaran langsung dan unggahan video ulang di kanal YouTube Metro TV. Proses ini termasuk dalam distribusi primer yang menjaga keutuhan dan konteks wacana. Namun, rekontekstualisasi tetap mungkin terjadi ketika potongan-potongan pernyataan Asep disebarkan di media sosial atau dipetik oleh media daring lainnya. Dalam hal ini, framing media terhadap kutipan seperti “pasti wong elit, bukan wong alit” dapat memunculkan interpretasi politik tertentu, tergantung dari sudut pandang dan kepentingan media tersebut.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Muhammad Yusuf Iqbal, Mayasari, dan Yanti Tayo (2023), yang mengungkapkan bahwa media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik melalui pemilihan diksi, modalitas, dan repetisi. Dalam penelitiannya, media online seperti Kompas.id secara aktif membingkai isu politik (perpanjangan masa jabatan presiden) melalui cara-cara linguistik tertentu, meskipun akses publik dibatasi. Hal serupa terjadi dalam distribusi wacana Asep, di mana konteks siaran terbuka tetap memungkinkan terbentuknya sudut pandang tertentu melalui interpretasi media maupun publik.

Pada tahap konsumsi, sebagian besar audiens menunjukkan pola konsumsi akomodatif, mengapresiasi keberanian Asep dalam menyampaikan kritik terhadap aktor-aktor kekuasaan. Tanggapan di media sosial menunjukkan kepercayaan terhadap Kejaksaan Agung dan dukungan terhadap pembongkaran praktik korupsi. Namun, konsumsi oposisional juga muncul, terutama dari pihak yang merasa tersindir atau menilai bahwa kritik Asep bersifat menyudutkan secara politis.

Dengan demikian, pada level mesostruktural, praktik wacana Asep merupakan proses sosial yang melibatkan negosiasi makna antara aktor, media, dan publik. Wacana ini bukan hanya informasi, melainkan bagian dari proses produksi makna ideologis yang dipengaruhi oleh konteks institusional dan teknologi media, sebagaimana juga dikemukakan dalam penelitian sebelumnya oleh Iqbal, dkk. (2023).

Pembahasan Analisis Makrostruktural

Analisis pada level makrostruktural mengikat keseluruhan temuan dengan konteks sosial dan budaya yang lebih luas, sesuai dengan tujuan utama Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough, yaitu menghubungkan analisis tekstual dengan struktur sosial. Dalam hal ini, wacana Asep Iwan Iriawan tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial-politik Indonesia, khususnya dalam konteks krisis kepercayaan publik terhadap elite kekuasaan dan institusi hukum.

Wacana Asep menjadi representasi praktik diskursif yang berusaha mengintervensi struktur kekuasaan hegemonik. Ungkapan seperti “pengusaha dan penguasa yang punya kekuatan tertentu” serta “pasti wong elit, bukan wong alit” tidak hanya menyampaikan kritik moral, tetapi juga secara aktif membingkai relasi kuasa yang timpang antara elite dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori Foucault, yang menyatakan bahwa wacana tidak netral, melainkan sarat dengan relasi kuasa yang mereproduksi dan menormalisasi dominasi sosial.

Sebagai mantan hakim dan pakar hukum, Asep berada pada posisi dengan otoritas simbolik untuk mengartikulasikan resistensi terhadap elite politik dan ekonomi. Melalui media arus utama, ia memanfaatkan posisi tersebut untuk menegaskan bahwa praktik hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Dalam konteks ini, struktur sosial hierarkis dan eksklusif yang melindungi pelaku korupsi justru menjadi sasaran utama kritik.

Temuan ini relevan dengan penelitian Hajrah, Anisa Maulidiah Alam, dan Jufri (2024) yang menunjukkan bagaimana pemimpin negara menggunakan bahasa untuk membangun legitimasi kekuasaan dan citra kepemimpinan melalui struktur kalimat afirmatif dan modalitas tinggi. Dalam kasus Asep, terjadi proses yang sebaliknya: bahasa digunakan bukan untuk memperkuat kekuasaan, melainkan untuk menantanginya secara terbuka, dengan pilihan diksi dan struktur wacana yang membongkar relasi kuasa dalam sistem hukum dan politik.

Dengan demikian, wacana Asep berfungsi sebagai alat kritik sosial yang merefleksikan kondisi sosial-politik pasca pandemi: ketimpangan, korupsi, dan kegagalan transparansi institusional. Dalam konteks ini, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat perjuangan simbolik, sebagaimana diposisikan dalam pendekatan Fairclough maupun Foucault.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa Analisis Wacana Kritis (AWK) terhadap pernyataan Asep Iwan Iriawan dalam konteks pemberitaan kasus korupsi CPO menunjukkan bahwa wacana bukanlah sekadar susunan kata atau opini individual, melainkan praktik sosial yang kompleks dan sarat muatan ideologis, kekuasaan, serta refleksi dari struktur sosial yang melingkupinya. Pendekatan tiga dimensi dari Fairclough mengungkap bahwa wacana Asep merupakan bentuk intervensi simbolik yang efektif dalam mengkritisi relasi kuasa dalam sistem hukum dan politik Indonesia.

Pada tingkat mikrostruktural, pilihan kata seperti “wong elit” dan “bermain” mengandung makna ideologis yang membingkai kritik terhadap elite kekuasaan dan praktik manipulatif dalam pengelolaan negara. Struktur kalimat yang retorik dan modalitas yang kuat mempertegas posisi Asep sebagai figur moral dan hukum yang menantang ketimpangan serta menuntut transparansi.

Pada tingkat mesostruktural, wacana diproduksi dalam ruang media arus utama yang kredibel (Breaking News Metro TV), didistribusikan melalui kanal digital, dan dikonsumsi oleh publik dengan beragam interpretasi. Proses produksi hingga konsumsi menunjukkan adanya rekontekstualisasi makna yang memungkinkan terbentuknya opini publik baik yang mendukung maupun yang menolak, bergantung pada posisi sosial, kepentingan, dan ideologi penerima wacana.

Sementara pada tingkat makrostruktural, wacana Asep mencerminkan resistensi terhadap struktur sosial-politik yang hegemonik dan hierarkis. Bahasa digunakan bukan untuk melanggengkan kekuasaan, tetapi untuk membongkar dominasi sosial serta menegaskan ketimpangan yang terjadi antara rakyat biasa dan elite. Dalam konteks pasca pandemi, pernyataan Asep merepresentasikan bentuk kritik sosial terhadap kegagalan institusi dalam mewujudkan keadilan dan akuntabilitas.

Dengan demikian, wacana Asep Iwan Iriawan merupakan bentuk praktik diskursif yang kuat, di mana bahasa berperan bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen perjuangan sosial, moral, dan politik. Analisis ini menegaskan relevansi AWK dalam memahami bagaimana wacana digunakan untuk mengartikulasikan kritik dan membentuk opini dalam dinamika masyarakat kontemporer.

DAFTAR REFERENSI

- Alamsyah, A., Mayasari, N., & Lubis, R. (2024). Analisis Wacana Kritis terhadap Pidato Megawati tentang Minyak Goreng di Media Digital. *Jurnal Komunikasi Politik*, 18(2), 142–159.
- Amir, R., Nidhal, A., & Alta, F. (2022). Polemik Korupsi Ekspor Minyak Sawit: Studi Kasus

-
- Wilmar dan Kebijakan Ekspor Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 12(1), 33–49.
- Bahasa, B. P. dan P. (2025). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi V)*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Baskoro, G. (2009). *YouTube: Dunia dalam Genggaman Video*. Mediakita.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Eriyanto. (2015). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. LKiS.
- Eryon, E. (2011). Satu Tinjauan Diskripsi Tentang Modalitas Bahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia. *Linguistika: Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Bandar Lampung*, 2(2), 146112.
- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Routledge.
- Hajrah, S., Alam, M., & Jufri, L. (2024). Retorika Presiden dalam Pidato Geopolitik Pasca Pandemi: Kajian Wacana Kritis. *Jurnal Ilmu Komunikasi Politik*, 11(1), 72–88.
- Ikhsan, Y. (2022). Pembingkai Citra Polisi pada Tagar# PercumaLaporPolisi (Analisis Wacana Kritis Metode Norman Fairclough). *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 9(2), 217–224.
- Iqbal, T., Mayasari, N., & Tayo, A. (2023). Framing Diksi Media dalam Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Studi pada Kompas.id. *Jurnal Media & Politik*, 9(1), 51–67.
- Korupsi, K. P. (2024). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2023*. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan>
- Lestari, Y. (2022). Media dan Selebriti di Media Televisi: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 604–612.
- Miller, V. (2019). *Understanding Digital Culture* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Niu, Z., Jiang, S., & Wang, H. (2023). Public perception of social issue videos on YouTube: Content value and platform risks. *Telematics and Informatics*, 84. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2023.102011>
- Sasmitha, P. (2022). Sarkasme sebagai Kritik Sosial: Studi Kasus Stand-up Comedy Indonesia. *Jurnal Komedi Dan Kritik*, 4(1), 25–40.
- Watch, I. C. (2023). *Tren penindakan korupsi tahun 2021–2023*. <https://antikorupsi.org/id/content/tren-korupsi>